

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 26 tahun 2007 mengamanatkan perlunya suatu perencanaan pembangunan yang berbasis penatagunaan ruang yang mengharuskan setiap daerah menyusun konsep ketataruangan agar pembangunan yang direncanakan memiliki pondasi yang kuat dan terarah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. Penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) suatu daerah pada dasarnya mengacu pada potensi sumberdaya yang ada, baik dari potensi sumberdaya manusia maupun potensi sumberdaya lahan, sebab pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan pemanfaatan yang optimal dari sumberdaya lahan yang tersedia (Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

Perencanaan tata ruang wilayah berkaitan dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan efektif, perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya. Rencana Tata Ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah. Dengan berbasis penataan ruang, kebijakan pembangunan akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial budaya dan lingkungan (Dirjen Penataan Ruang, 2005).

Kebijakan pembangunan suatu wilayah bertujuan untuk mengoptimalkan usaha dan proses pembangunan yang berlangsung sehingga dapat dicapai suatu

pembangunan yang terarah. Kebijakan ini diwujudkan pada seluruh aspek pembangunan termasuk aspek ruang (spasial). Aspek ruang diperlukan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan pembangunan, baik dari segi perwilayahan maupun dari sektoral sehingga tujuan sasaran pembangunan pada suatu wilayah terpenuhi (Bappeda Aceh, 2007).

Rencana tata ruang dan penataan ruang wilayah diperlukan sebagai pengendalian kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992 bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi, kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Berbagai kendala Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan wilayah kabupaten/kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota diantaranya disebabkan oleh faktor; teknik operasional, administratif dan tuntutan perkembangan pasar. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang) atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah disusun. Oleh sebab itu sangat dirasakan pentingnya suatu kegiatan evaluasi terhadap produk rencana tata ruang yang telah ada untuk melihat apakah produk rencana tata ruang tersebut berjalan sesuai dengan pemanfaatannya atau telah terjadi penyimpangan.

Kegiatan evaluasi lebih ditekankan pada kegiatan pemantauan perubahan tata ruang terhadap pemanfaatan ruang yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan

pemanfaatan ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan amanat yang ditegaskan dalam Undang Undang Penataan Ruang No. 24 tahun 1992.

Gempa dan tsunami yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 memberi dampak kerusakan yang sangat besar. Bencana ini juga berdampak besar pada keseimbangan kehidupan, gempa dan tsunami terparah terjadi di kota Banda Aceh Dan Meulaboh. Gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa di Indonesia. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatra. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Kebanyakan korban meninggal disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara.

Meulaboh adalah ibu Kota Kabupaten Aceh Barat terletak 250 km arah barat Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Meulaboh merupakan kota terbesar di pesisir barat-selatan Aceh. Sebelum terjadinya tsunami tahun 2004, Meulaboh merupakan daerah yang sangat pesat, pekerjaan sebagian besar penduduk adalah perdagangan dan jasa. Pembangunan mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada saat terjadi tsunami kota ini merupakan kota yang sangat dahsyat terkena gelombang tsunami yang menghancurkan hampir seluruh Kota Meulaboh. Kota yang sempat lumpuh oleh tsunami pada tahun 2004 yang lalu, seiring dengan perjalanan waktu terus berbenah sekarang ini. Salah satu pembenahan yg dilakukan adalah penataan tata ruang kota.

Pembangunan yang dilakukan pasca tsunami yang dilakukan pemerintah dan bantuan dari negara asing menjadikan Kota Meulaboh sangat berbeda pada tahun 2004 lalu, data dari Bapeda Aceh Barat menyatakan pada tahun 2004 sampai tahun

2013 adanya perubahan yang signifikan. Pada tahun 2013 gedung-gedung sudah terbangun, permukiman penduduk terbangun, aksesibilitas jalan sudah bagus, begitu pula sarana kesehatan serta pendidikan telah terbangun berbeda pada tahun 2004. Begitu juga dengan perubahan lahan yang terjadi, perubahan lahan yang dimaksud meliputi sawah, tegalan, hutan dan ruang terbangun (RTB). Faktor-faktor pembangunan dan perubahan lahan tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk, serta topografi wilayah menjadikan masyarakat yang trauma tidak mendirikan bangunan di pinggir pantai. Untuk itu kegiatan evaluasi diperlukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan tata ruang Kota Meulaboh pasca tsunami, serta faktor-faktor pemicu perubahan lahan di Kota Meulaboh.

Evaluasi tata ruang mencakup proses pengukuran akan perubahan penggunaan lahan di Kota Meulaboh yang meliputi sarana kesehatan, pendidikan, aksesibilitas jalan, serta faktor-faktor yang memicu perubahan tersebut. Sehingga penelitian dilakukan di Kota Meulaboh untuk mengetahui perubahan lahan yang terjadi sebelum dan sesudah tsunami untuk mengevaluasi tata ruang kota pada tahun 2004-2013.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pembangunan tata ruang kota pasca tsunami tahun 2004-2013 yang dilakukan pemerintah dan pihak asing menjadikan Kota Meulaboh memerlukan evaluasi tata ruang kota. Untuk mengukur seberapa besar perubahan tata ruang kota diperlukan evaluasi tata ruang kota sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perubahan tata ruang kota sebelum dan sesudah tsunami meliputi sarana kesehatan, sarana pendidikan, panjang jalan perubahan lahan meliputi

sawah, tegalan, hutan, ruang terbangun (RTB), permukiman dan faktor-faktor apa saja yang memicu perubahan penggunaan ruang di Kota Meulaboh meliputi faktor pertumbuhan penduduk, topografi, serta faktor lokasi, kemudian di hitung dan di analisis data-data yang ada untuk mengetahui perkembangan pembangunan yang sudah terbangun dari tahun 2004-2013.

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi objek penelitian agar lebih terarah, maka penulis membatasi masalah pada mengevaluasi tata ruang kota, meliputi sarana kesehatan, saran pendidikan, panjang jalan dan perubahan lahan sebelum dan sesudah tsunami meliputi sawah, tegalan, hutan dan ruang terbangun (RTB), permukiman, dan faktor-faktor apa saja yang memicu perubahan tersebut meliputi faktor pertumbuhan penduduk, topografi, serta faktor lokasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi perumusan pokok dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi tata ruang kota sebelum dan sesudah tsunami di Kota Meulaboh tahun 2004-2013 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang memicu perubahan penggunaan ruang di Kota Meulaboh tahun 2004-2013?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi tata ruang sebelum dan sesudah tsunami di Kota Meulaboh tahun 2004-2013.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memicu perubahan penggunaan ruang di Kota Meulaboh tahun 2004-2013.

F. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perubahan tata ruang Kota Meulaboh pasca tsunami tahun 2004-2013.
2. Bagi pemerintah sebagai penentu sikap pemerintah untuk langkah-langkah selanjutnya terhadap tata ruang Kota Meulaboh.
3. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai evaluasi tata ruang kota.
4. Bagi mahasiswa pendidikan geografi agar menambah wawasan dan pengetahuan mengenai evaluasi tata ruang kota.

THE
Character Building
UNIVERSITY